



Pastikan Relokasi PKL Tak Ditunda Sultan Sudah Menunggu 18 Tahun

YOGYA (KR) - Meski ada sebagian pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Malioboro yang meminta agar relokasi ditunda, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X memastikan proses relokasi PKL di kawasan Malioboro tetap dilaksanakan hari ini, Rabu (26/1).

Adapun dua lokasi yang disiapkan adalah eks Gedung Bioskop Indra dan eks Kantor Dinas Pariwisata (Diapar) DIY. Jadi adanya keinginan sebagian PKL agar relokasi PKL Malioboro ditunda tidak bisa dipenuhi.

Mengingat untuk melakukan relokasi tersebut pihaknya sudah menunggu selama 18 tahun. "Ya jadi relokasi tetap berjalan. Jadi ya nggak ditunda aku wis ngenteni 18 tahun (aku sudah menunggu 18 tahun). Jadi ora ming mundur 3 tahun, tapi wis 18 tahun (jadi tidak hanya mundur 3 tahun, tapi sudah menunggu 18 tahun). Makanya PKL minta tidak karena saya sudah nunggu 18 tahun," kata Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Selasa (25/1).

Seperti diketahui sebagian PKL meminta agar relokasi ditunda selama 1 hingga 3 tahun, atau setidaknya sampai setelah Lebaran. Sultan mengatakan, upaya penataan perlu dilakukan karena selasar Malioboro seharusnya tidak dipergunakan PKL untuk berjualan. Karena, selasar atau lorong-lorong pertokoan sebenarnya dimiliki oleh pemilik toko dan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Untuk itu relokasi harus dilakukan karena



Sekda DIY K Bashara Aji didampingi Walikota Yogyakarta Haryadi Suguti dan Wakil Walikota Heroe Poertvadi meninjau tempat relokasi PKL Malioboro di eks Gedung Bioskop Indra.

jalur pedestrian Malioboro bukan milik PKL.

"Relokasi harus dilakukan karena tempat itu bukan milik mereka (PKL), tapi milik toko dan Pemda. Jadi ora usah mundur 3 tahun (tidak perlu menunggu tiga tahun). Kalau sekarang bisa kenapa harus besok," ujar Sultan.

Sementara itu Ketua Paguyuban PKL Tri Dharma, Rudiarto menyatakan, awalnya pihaknya berharap keberadaan PKL bisa menjadi bagian dari ikon pariwisata Malioboro. Tapi akhirnya pihaknya bisa memahami. Semua itu diawali dari sosialisasi awal berangkat dari konsep pedestrian kawasan revitalisasi Malioboro atau revi-

talisasi dari Tugu sampai Panggung Krapyak.

"Sebetulnya sosialisasi konsep besarnya sudah dimulai dari tahun 2014. Di mana sebelum pedestrian sisi Timur ada, tersirat dalam gambar desain tersebut suatu saat PKL Malioboro akan berpindah dari Malioboro. Tapi masih tetap berada di Kawasan Malioboro. Akhirnya kami menerima dengan syarat dan menjadi pertimbangan-pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan tahapan-tahapan relokasi," terang Rudiarto.

Menurutnya, syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah dan menjadi keinginan PKL adalah relokasi dilakukan terha-

dap semua PKL tanpa kecuali. Selain itu di tempat yang lama yang selama ini dipakai oleh para PKL.

Setelah proses relokasi tidak ada lagi muncul pedagang baru, maupun tempatnya dipakai oleh pemilik toko atau pemodal besar. Tentunya di tempat relokasi harus memiliki syarat-syarat kelayakan usaha, daya tampung, menunjang keberlanjutan usaha, ada promosi yang dilakukan pemerintah agar kegiatan ekonomi bisa tetap berlanjut.

"Sesuai dengan pandangan Ngarsa Dalem bahwa Malioboro akan naik kelas. Harapannya tingkat kunjungan bisa meningkat. Jadi memang ini untuk kebaikan kita

agar bisa lebih baik. Baik mengenai legalitas, kepastian usaha dan sebagainya karena selama ini kita bukan salah waktu tapi kita posisinya salah tempat. Salah waktu karena kita sudah jualan di sini selama berpuh-puluh tahun.

Tapi setelah tahu legalitasnya ternyata tempat ini milik orang, bukan milik Pemda," paparnya.

Sebagai pengurus paguyuban PKL pihaknya berterima kasih bisa ditampung pemerintah walaupun sifatnya sementara. Rudiarto berharap di tempat yang baru lapak bisa lebih baik. Begitu pula dengan keluasannya tidak berubah, pengunjung lebih banyak dan berkualitas.
* Bersambung hal 7 kol 1

Sultan

"Saya tilip pesan kepada pemerintah tolong ada keberpihakan kepada ekonomi

kecil. Apabila menemui masalah di shelter baru atau sementara pemerintah sege-

Sambungan hal 1

ralah bertindak sebelum terjadi masalah sosial yang berat, untkapnya. (Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005